ANALISIS DAYA SAING KEDELAI DI KABUPATEN SUMENEP

Miftah Farid¹⁾, Ida Ekawati²⁾, Ika Fatmawati P.³⁾

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Univertas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis daya saing kedelai ditinjau dari segi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, 2) Mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. Analisis yang digunakan adalah matrik kebijakan atau *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai keunggulan kompetitif. Dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output memberikan dampak positif terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. Begitu juga dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan berdampak positif terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep.

Kata kunci: analisis daya saing, kedelai

I. PENDAHULUAN

Kedelai merupakan komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik sebagai bahan makanan manusia, pakan ternak, bahan baku industri maupun bahan penyegar. Bahkan dalam tatanan perdagangan pasar internasional, kedelai merupakan komoditas ekspor berupa minyak nabati, pakan ternak dan lain-lain di berbagai negara di dunia.

Kebutuhan kedelai dalam negeri tiap tahun cenderung terus meningkat, sedangkan persediaan produksi belum mampu mengimbangi permintaan. Berdasarkan data RI impor bahan pangan, pada tahun 2006, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 1,2 juta ton per tahun, dan data RI impor bahan pangan (persen dari kebutuhan) kedelai impor sebanyak 45% dari total kebutuhan dalam negeri (Mas'ood, 2006 dalam Saksono, 2007).

Di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, kedelai merupakan komoditas unggulan, mempunyai nilai ekonomi dan kompetitif yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, produktivitas tanaman kedelai pada tahun 2007 mencapai 1,65 ton per hektar. Sedangkan luas tanam komoditas

kedelai di kabupaten Sumenep yaitu 6.715 ha dengan jumlah produksi 110.800 kw/tahun.

Dari uraian di atas, permintaan untuk komoditi kedelai yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memerlukan peningkatan produksi kedelai untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, peluang produk agribisnis khususnya kedelai cukup terbuka pada era perdagangan bebas. Oleh karena itu, persaingan yang ketat antar produsen akan terjadi pada pasar internasional yang semakin terbuka. Menghadapi persaingan yang ketat ini, keberhasilan akan ditentukan oleh keunggulan daya saing produk agribisnis yang dihasilkan. Daya saing dapat dilihat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu komoditas, dimana keduanya harus saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis daya saing ditinjau dari segi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
2. Mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep

- 1) Mahasiswa Jur. Agribisnis, Fak. Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep
- 2) Dosen Jur. Agribisnis, Fak. Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep
- 3) Dosen Jur. Agribisnis, Fak. Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep

II. METODE PENELITIAN

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan salah satu penghasil kedelai yang cukup tinggi.

Pengambilan sampel menggunakan metode *Stratified Cluster Sampling* yaitu pengambilan contoh berdasarkan area atau cluster (Nazir, 1988). Area atau cluster yang dipilih adalah satu kecamatan dengan area penanaman terluas. Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Guluk-Guluk yang kemudian diambil satu desa yang memiliki area penanaman kedelai terluas atau dominan yaitu Desa Guluk-Guluk. Kemudian pada desa tersebut diambil sampel dengan stratifikasi berdasarkan luas lahan pengusahaan kedelai. Stratifikasi luas lahan ditetapkan mejadi luas lahan sempit, luas lahan sedang dan luas lahan luas yang meliputi: (a) < 0,3 ha; (b) 0,3 -0,5 ha; (c) > 0,5 ha.

Formulasi ukuran contoh mengacu pada pendapat Cochran (2005) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\frac{t^2 \cdot P \cdot Q}{d^2}}{1 + \frac{1}{N} \left[\frac{t^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right]}$$

Tabel 1. Jumlah Sampel Petani Berdasarkan Luas Lahan

Strata Luas Lahan (ha)	Populasi	Sampel
< 0,3	387	22
0,3-0,5	491	28
> 0,5	322	18
Jumlah	1200	68

Untuk menguji hipotesis baik hipotesis pertama maupun hipotesis kedua digunakan alat analisis matrik kebijakan

Dimana:

n = Besar sampel

P = Probabilitas

Q = 1 - P

N = Ukuran populasi

t = Nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan

d = Standar error yang digunakan

Formulasi ukuran contoh petani per strata luas lahan digunakan rumus sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi, 1986):

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

Dimana :

f_i = fraksi contoh strata ke-i

N_i = besarnya subpopulasi strata ke-i

N = besarnya populasi

Besarnya sub contoh per strata adalah:

$$n_i = f_i n$$

Dimana

n_i = besarnya sub contoh

n = besarnya contoh

Jumlah populasi petani yang menanam kedelai di Desa Guluk-Guluk sebanyak 1200 petani. Dari perhitungan penarikan sampel di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 68 petani. Sehingga diperoleh sampel masing-masing strata adalah sebagai berikut:

Policy Analysis Matrix (PAM). Tabel PAM dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Identifikasi Divergensi dalam *Policy Analysis Matrix* (PAM)

Uraian	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Input	Faktor	
Privat	A	B	C	D
Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber: Pearson *et. al* (2003)

Dari data tabel 2, dapat dianalisis dengan berbagai indikator sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Finansial (Keuntungan Kompetitif) atau Privat Cost Ratio

$$PCR = \frac{\text{Biaya input non tradable privat (C)}}{\text{Penerimaan Privat (A) - Penerimaan input tradable privat (B)}}$$

- 2) Analisis efisiensi domestik (Keunggulan Komparatif) atau Domestic Resource Cost Ratio

$$DRC = \frac{\text{Biaya input non tradable sosial (G)}}{\text{Penerimaan sosial (E) - Penerimaan input tradable sosial (F)}}$$

- 3) Output Transfer

$$OT = \text{Penerimaan Privat (A) - Penerimaan Sosial (E)}$$

- 4) Transfer Input

$$IT = \text{Biaya input tradable privat (B) - Biaya input tradable sosial (F)}$$

- 5) Transfer Faktor

$$FT = \text{Biaya input non tradable privat (C) - Biaya input non tradable sosial (G)}$$

- 6) Transfer Bersih

$$NT = \text{Keuntungan privat (D) - Keuntungan sosial (H)}$$

- 7) Nominal Protection Coefficient on Tradable Output

$$NPCO = \frac{\text{Penerimaan Privat (A)}}{\text{Penerimaan Sosial (E)}}$$

- 8) Nominal Protection Coefficient on Tradable Input

$$NPCI = \frac{\text{Biaya input tradable privat (B)}}{\text{Biaya input tradable sosial (F)}}$$

- 9) Effective Protection Coefficient

$$EPC = \frac{\text{Penerimaan Privat (A) - Biaya input tradable privat (B)}}{\text{Penerimaan Sosial (E) - Biaya input tradable sosial (F)}}$$

- 10) Profitability Coefficient

$$PC = \frac{\text{Keuntungan Privat (D)}}{\text{Keuntungan Sosial (H)}}$$

- 11) Subsidy Ratio to Producer

$$SRP = \frac{\text{Transfer Bersih (L)}}{\text{Penerimaan Sosial (E)}}$$

Untuk menguji hipotesis pertama, yaitu ada tidaknya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari komoditas kedelai maka digunakan kriteria *Domestic Resources Cost* (DRC) dan kriteria *Private Cost Ratio* (PCR). Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai DRC ≤ 1 , maka terdapat keunggulan komparatif usahatani kedelai
- b) Jika nilai DRC > 1 , maka tidak terdapat keunggulan komparatif usahatani kedelai
- c) Jika nilai PCR ≤ 1 , maka terdapat keunggulan kompetitif usahatani kedelai
- d) Jika nilai PCR > 1 , maka tidak terdapat keunggulan kompetitif usahatani kedelai

Sedangkan untuk menguji hipotesis kedua dilihat dari indikator penting yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah terhadap Output

Kebijakan pemerintah terhadap output diterangkan dengan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) dan *Output Transfer* (OT). Nilai NPCO menunjukkan dampak intensif dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output yang diukur dengan harga privat dan harga sosial.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Nilai NPCO ≤ 1 , tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- b) Nilai NPCO > 1 , terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Input Tradable

Kebijakan pemerintah terhadap input tradable digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap petani dan subsidi yang diberikan terhadap usahatani kedelai. Kebijakan pemerintah ini diterangkan dengan *Nominal Protection*

Coefficient Input (NPCI) dan *Transfer Input* (IT).

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Nilai NPCI ≤ 1 , terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- b) Nilai NPCI > 1 , tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

3. Kebijakan Pemerintah terhadap Input Tradable dan Output

Untuk mengetahui perbedaan harga sosial dan harga privat yang diterima petani, terutama untuk input produksi yang tidak diperdagangkan pada pasar internasional digunakan indikator Transfer Faktor (FT). Apabila nilai transfer faktor positif berarti biaya usahatani untuk barang-barang domestik dibayar dengan harga yang lebih mahal daripada harga riil. Selain itu digunakan indikator *Net Policy Transfer* yang bila memberikan nilai negatif berarti kebijakan pemerintah tersebut belum memberi nilai tambah pada pengembangan usahatani kedelai. Nilai transfer bersih dapat menunjukkan tingkat ketidakefisienan dalam sistem pertanian yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Daya Saing kedelai ditinjau dari Segi Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif

1) Keunggulan Komparatif

Hasil analisis dapat diketahui bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep memiliki keunggulan komparatif. Ini dibuktikan dengan nilai DRC yang diperoleh adalah 0,4702 yang berarti bahwa untuk menghasilkan satu satuan tambah *output* hanya dibutuhkan biaya faktor domestik pada harga sosial sebesar 0,4702 satuan atau untuk menghasilkan satu satuan tambah *output* dapat dihemat sebesar Rp. 5.012,69, sehingga memproduksi sendiri di dalam negeri

lebih efisien daripada melakukan impor kedelai. Nilai tersebut diatas berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap US\$ sebesar Rp. 9.319.

Selain itu, kesesuaian lahan di Kabupaten Sumenep untuk ditanami kedelai dapat mendukung keberhasilan usahatani kedelai sekaligus memberikan hasil yang lebih memuaskan. Peran pemerintah khususnya pembinaan terhadap petani juga tidak lepas dalam keberhasilan usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, Kabupaten Sumenep dijadikan sebagai salah satu daerah untuk pengembangan komoditi kedelai di Jawa Timur.

Hasil analisis keunggulan komparatif usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep menunjukkan nilai yang lebih kecil dari keunggulan komparatif usahatani kedelai di Kabupaten Banyuwangi pada penelitian Soetrisno. Nilai keunggulan komparatif di Kabupaten Banyuwangi adalah 0,67 sedangkan nilai keunggulan komparatif di Kabupaten Sumenep adalah 0,4702. Dengan demikian, Kabupaten Sumenep lebih memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi.

2) Keunggulan Kompetitif

Hasil analisis, dapat diketahui bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep memiliki nilai PCR 0,3095 yang berarti untuk menghasilkan satu-satuan nilai tambah output pada harga privat diperlukan korbanan faktor sumberdaya domestik sebesar 0,3095 satuan atau untuk menghasilkan satu-satuan output dapat dihemat sebesar Rp. 6.434,77. Nilai PCR di atas berdasarkan asumsi

nilai tukar rupiah terhadap US\$ sebesar Rp. 9.319.

Berdasarkan hasil analisa PCR, dapat diketahui bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep menghasilkan kedelai dengan kemampuan berkompetisi di pasar internasional. Hal ini terjadi karena usahatani kedelai memiliki kesesuaian dengan lahan dan sumberdaya domestik. Adanya kesesuaian lahan dan sumberdaya domestik memungkinkan adanya efisiensi dalam menggunakan *input tradable*. Dengan demikian penggunaan faktor domestik lebih optimal dan pengeluaran untuk biaya input lebih rendah.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi pada penelitian Soetrisno, Kabupaten Sumenep memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dari Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan nilai keunggulan kompetitif Kabupaten Sumenep menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai keunggulan kompetitif di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil analisa PCR dan DRC di atas membuktikan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Hal ini terjadi karena pemerintah memberikan subsidi pada harga pupuk khususnya pupuk urea dan pupuk TSP serta kebijakan penetapan harga ideal.

3.2. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Hasil analisis NPCI dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Transfer *Input Tradable* Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Input Tradable							NPCI
	Benih (Rp/ha)	Organik (Rp/ha)	Urea (Rp/ha)	TSP (Rp/ha)	Postag (Rp/ha)	Dursban (Rp/ha)	Total (Rp/ha)	
Privat	410.199,27	969.839,25	127.471,29	306.876,39	18.712,98	16.591,03	1.849.690,21	0,5093
Sosial	410.199,27	969.839,25	624.398,49	1.599.103,48	14.970,39	13.272,83	3.631.783,70	
Divergensi	-	-	(496.927,20)	(1.292.227,09)	3.742,60	3.318,21	(1.782.093,49)	

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai NPCI usahatani kedelai adalah sebesar 0,5093, yang berarti bahwa petani membeli *input tradable* dengan harga 49% lebih rendah dari harga input sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* berdampak positif terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep.

Dari nilai divergensi diketahui pula bahwa petani kedelai harus membayar *input tradable* berupa urea dan TSP lebih murah dari harga sosialnya. Sedangkan untuk pestisida berupa postag dan dursban petani harus membayar lebih mahal dari harga sosialnya.

Divergensi akibat lebih murah harga yang harus dibayarkan petani dengan harga yang sebenarnya mengindikasikan adanya subsidi yang diberikan pemerintah. Sebaliknya, bila harga yang harus dibayarkan petani lebih mahal dari harga yang sebenarnya mengindikasikan adanya pajak yang dibebankan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi pupuk terhadap petani kedelai khususnya pada pupuk urea sebesar Rp. 2.300,00 atau 65%, dimana harga pupuk yang harus dibayarkan petani adalah Rp. 1.200,00 sedangkan harga tanpa subsidi adalah Rp. 3.500,00.

Lebih mahal harga *input tradable* pestisida postag dan dursban disebabkan tidak adanya proteksi dari pemerintah berupa subsidi. Akan tetapi, penjualan input tersebut dibebani PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada jenis input pestisida. Pembebanan pajak dari pemerintah dikenakan atau ditambahkan secara langsung oleh distributor, sehingga harga input di tingkat petani lebih tinggi dari harga sosialnya. Pajak yang dibebankan oleh pemerintah terhadap petani khususnya pada pestisida baik postag maupun dursban sebesar 20%.

Kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* benih dan pupuk organik untuk

usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep sama sekali tidak mempengaruhi harga di tingkat petani, hal ini dibuktikan dari nilai divergensi sebesar nol. Nilai tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan subsidi maupun pajak untuk benih kedelai dan pupuk organik, sehingga harga yang harus dibayarkan petani adalah sama dengan harga sosialnya.

Hal ini disebabkan bibit yang diterima oleh petani adalah bibit lokal. Oleh karena itu harga sosialnya sama dengan harga privatnya. Sedangkan pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari domestik yang diperoleh kotoran ternak milik petani. Untuk pupuk organik tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi harga pupuk organik yang digunakan.

Sedangkan hasil analisis *Transfer Input (IT)* yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar Rp. – 1.782.093,49. Angka IT menunjukkan nilai negatif yang disebabkan oleh subsidi atas pupuk sekitar 51%, sehingga total biaya input tradable yang dikeluarkan hanya 49% dari biaya seharusnya.

Kebijakan pemerintah terhadap faktor domestik (*input non tradable*) ditunjukkan dari penggunaan tenaga kerja, alat produksi, modal, lahan dan biaya penyusutan yang digunakan selama berusaha kedelai secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4.

Faktor domestik tenaga kerja dan lahan yang dikeluarkan dalam memproduksi kedelai di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya divergensi. Pada faktor domestik tenaga kerja, nilai divergensi adalah sebesar Rp. 187.589,95 lebih tinggi dari upah tenaga kerja yang seharusnya dikeluarkan selama melakukan produksi.

Pengaruh ini disebabkan karena dalam melakukan kegiatan usahatani kedelai, petani menggunakan tenaga tidak terampil. Upah yang diberikan kepada

tenaga kerja tidak terampil mencerminkan upah sosial yang sesungguhnya. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah seperti

adanya tingkat upah minimum yang menyebabkan tingkat upah yang diterima lebih tinggi dari tingkat upah sebenarnya.

Tabel 4. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Faktor Domestik Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Faktor Domestik					
	Lahan	Tenaga Kerja	Alat Produksi	Modal	Penyusutan	Total
Privat	1.250.540,72	937.949,75	549.567,16	-	125.150,44	2.863.208,07
Sosial	1.062.959,61	750.359,80	549.567,16	565.547,79	125.150,44	3.053.584,81
Divergens	187.581,11	187.589,95	-	(565.547,79)	-	(190.376,74)

Sedangkan pada faktor domestik modal yang dikeluarkan untuk memproduksi kedelai nilai divergensinya adalah negatif yaitu Rp. -565.547,79. Perolehan nilai negatif ini disebabkan karena modal yang dikeluarkan oleh petani keseluruhan berasal dari petani sendiri secara individual. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tingkat suku bunga nominal yang perlu dibayarkan petani, sedangkan tingkat suku bunga sosial per tahun hanya sebesar 12%.

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Terjadinya penerimaan finansial lebih besar dari penerimaan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan harga dan mekanisme pasar yang berpengaruh positif terhadap harga aktual komoditas

kedelai di tingkat petani, maka secara finansial penerimaan petani lebih tinggi daripada penerimaan ekonominya dan keunggulan negatif terhadap penerimaan petani dan keunggulan kedelai domestik.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap mekanisme pasar pada output kedelai, dapat diketahui dengan nilai NPCO (*Nominal Protection Coefficient Output*). Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai NPCO yang mempunyai nilai lebih dari satu, hal ini menyatakan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang memproteksi output atau harga privat output yang diterima petani lebih tinggi dari harga sosial. Hasil analisis dari penelitian secara jelas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Transfer Output Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Output (Rp/ha)	NPCO
Privat	11.101.598,24	1,0963
Sosial	10.126.699,76	
Divergens	974.898,48	

Pada Tabel 5, menunjukkan nilai koefisien NPCO untuk usahatani kedelai

di Kabupaten Sumenep sebesar 1,0963 artinya petani memperoleh harga 9,6% lebih tinggi dari harga dunia.

Tingginya harga kedelai yang diterima oleh petani jika dibandingkan dengan harga sosial kedelai di Kabupaten Sumenep disebabkan karena melonjaknya harga kedelai di tingkat internasional yang mencapai 100% sehingga pada awal tahun 2008 pemerintah melakukan kebijakan penetapan harga ideal kedelai sebesar Rp. 5.500,- per kilogram di tingkat petani sedangkan harga kedelai impor $\pm$ Rp. 4.900. Sedangkan nilai *output transfers* (OT) pada penelitian ini menunjukkan angka sebesar Rp. 974.898,48 yang disebabkan adanya kebijakan penetapan harga untuk komoditi kedelai.

Selain itu, mekanisme pasar juga ikut mempengaruhi terhadap harga komoditi kedelai, dimana persediaan komoditi pangan dan kacang-kacangan untuk kebutuhan dunia menurun karena sebagian dialihkan untuk pembuatan biodisel dan metanol. Hal ini menyebabkan kebutuhan kedelai semakin meningkat sedangkan persediaan semakin menurun sehingga harga komoditi kedelai cenderung meningkat dengan pesat.

Biaya produksi yang lebih tinggi dari yang semestinya menyebabkan harga kedelai di tingkat petani lokal lebih tinggi dari harga kedelai impor. Perbedaan harga ini diakibatkan dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan tarif bea masuk nol persen sehingga harga kedelai impor relatif lebih murah dari harga kedelai lokal.

B. Kebijakan Pemerintah terhadap Output dan Input Secara Keseluruhan

Kebijakan output dan input secara keseluruhan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Protection Transfer* (NPT), *Profitability Coefficient* (PC) dan *Subsidy Ratio to Producer* (SRP).

1. *Effective Protection Coefficient* (EPC)

Effective Protection Coefficient (EPC) atau analisis proteksi efektif digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keseluruhan kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input output, apakah memberikan insentif atau disinsentif terhadap usahatani kedelai. Nilai EPC pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu melindungi atau menghambat produk domestik secara efektif.

Bila nilai EPC lebih besar dari satu berarti dampak bersih kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi telah memberikan insentif (perlindungan) terhadap petani kedelai untuk mengembangkan usahatannya. Sebaliknya, jika nilai EPC lebih kecil dari satu berarti dampak bersih kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan disinsentif terhadap pengembangan usahatani kedelai.

Nilai EPC juga dapat menjelaskan seberapa persen nilai tambah yang dinikmati dari nilai tambah sosialnya. Nilai EPC pada usahatani kedelai ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai EPC Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Output (Rp/ha)	Input (Rp/ha)	EPC
Privat	11.101.598,24	1.849.690,21	1,4245
Sosial	10.126.699,76	3.631.783,70	
Divergensi	974.898,48	- 1.782.093,49	

Pada Tabel 6, menunjukkan bahwa nilai EPC sebesar 1,4245 yang berarti bahwa pemerintah memberikan insentif secara efektif kepada petani, karena terdapat nilai tambah yang dinikmati petani sebesar 42,5% sosialnya. Sehingga diketahui bahwa dampak bersih kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi telah memberikan insentif (perlindungan) kepada petani kedelai di Kabupaten Sumenep.

2. Net Protection Transfer (NPT)

Net Protection Transfer (NPT) merupakan nilai yang menggambarkan tambahan surplus produsen atau

berkurangnya surplus produsen yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, dihitung dari hasil pengurangan antara keuntungan bersih yang diterima produsen dengan keuntungan bersih sosial. Dengan kata lain, nilai transfer bersih output dapat dilihat dari nilai divergensi keuntungan privat dan sosial.

Pengambilan keputusan didasarkan pada hasil analisis NPT positif yang menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pemerintah. Sebaliknya jika NPT bernilai negatif berarti tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah. Hasil analisis NPT dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Nilai NPT Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Output (Rp/ha)	Input (Rp/ha)	Faktor Domestik (Rp/ha)	Keuntungan (Rp/ha)
Privat	11.101.598,24	1.849.690,21	2.863.208,07	6.388.699,95
Sosial	10.126.699,76	3.631.783,70	3.053.584,81	3.441.331,24
Divergensi	974.898,48	(1.782.093,49)	(190.376,74)	2.947.368,71

Pada Tabel 7, diketahui nilai transfer bersih untuk usahatani kedelai bernilai positif yaitu sebesar Rp. 2.947.368,71. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terhadap *input tradable* yang berupa kebijakan subsidi pupuk yang digunakan oleh petani kedelai di Kabupaten Sumenep. Selain itu, harga output atau harga kedelai di tingkat petani lebih tinggi dari harga yang seharusnya diterima petani atau harga sosial.

3. Profit Coefficient (PC)

Setelah mengetahui surplus atau nilai divergensi keuntungan privat dan sosial, lebih lanjut dapat diketahui pula beberapa perbandingan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial dengan menggunakan analisis *Profit Coefficient* (PC). Nilai PC adalah untuk mengetahui besarnya perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Nilai PC Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Output (Rp/ha)	Input (Rp/ha)	Faktor Domestik (Rp/ha)	Keuntungan (Rp/ha)	PC
Privat	11.101.598,24	1.849.690,21	2.863.208,07	6.388.699,95	1,86
Sosial	10.126.699,76	3.631.783,70	3.053.584,81	3.441.331,24	
Divergensi	974.898,48	(1.782.093,49)	(190.376,74)	2.947.368,71	

Pada Tabel 8, diketahui nilai PC untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep bernilai lebih dari satu positif yaitu sebesar 1,86 artinya petani memperoleh keuntungan privat lebih dari 86% dari keuntungan sosialnya.

4. *Subsidy Ratio to Producer (SRP)*

Subsidy Ratio to Producer (SRP) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur seluruh efek transfer. Rasio ini merupakan perbandingan antara transfer bersih dengan nilai output pada tingkat harga dunia, atau SRP menunjukkan sejauhmana pendapatan dari sistem meningkat atau menurun karena pengaruh transfer. Nilai SRP dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Nilai SRP Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Usahatani	Output (Rp/ha)	Input (Rp/ha)	Faktor Domestik (Rp/ha)	Keuntungan (Rp/ha)	SRP
Privat	11.101.598,24	1.849.690,21	2.863.208,07	6.388.699,95	0,29
Sosial	10.126.699,76	3.631.783,70	3.053.584,81	3.441.331,24	
Divergensi	974.898,48	(1.782.093,49)	(190.376,74)	2.947.368,71	

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan secara spesifik dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini dibuktikan dengan nilai PCR sebesar 0,3095 dan nilai DRC sebesar 0,4702 yang menunjukkan nilai kurang dari satu.
2. Kebijakan pemerintah berupa subsidi pupuk dan penetapan harga ideal kedelai serta pembinaan pemerintah di tingkat petani memberikan dampak positif atau berpihak baik dari segi output dan *input tradable* terhadap petani kedelai di Kabupaten Sumenep

DAFTAR PUSTAKA

- Cochran, William G. 2005. *Teknik Penarikan Sampel*. UI Press. Jakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Pearson, Scott, Carl Gotsch dan Sjaiful Bahri. 2003. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. www.macrofoodpolicy.com. Diakses 19 Januari 2006.
- Saksono, Hery. 2007. *Dinamika Struktur dan Agency dalam Pertanian Indonesia*. Makalah pada Temu Nasional Mahasiswa Pertanian Indonesia. Yogyakarta, 15 Februari 2007
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.